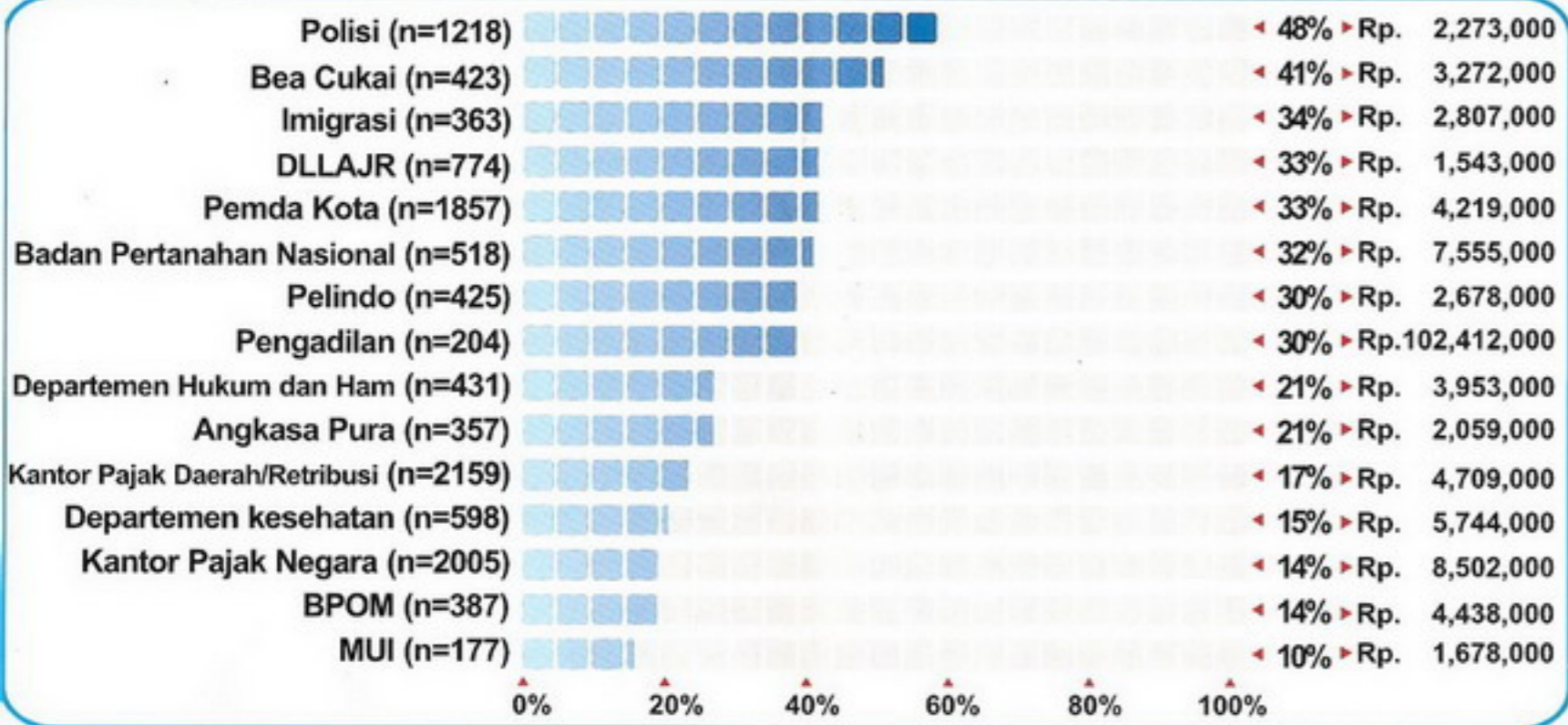


Indeks Suap 15 Institusi Publik di Indonesia dan Rata-rata Jumlah Uang Yang dibayarkan per Transaksi.



Keterangan Lebih Lengkap Tentang Hasil Survei IPK Indonesia 2008 dapat didapatkan dalam buku "Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 Dan Indeks Suap" yang diluncurkan TI-Indonesia atas dukungan masyarakat Amerika melalui Millenium Challenge Corporation dan USAID.

Apakah TI-Indonesia?

TI-Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus kerjanya adalah berusaha memberantas korupsi, melalui usaha perbaikan sistem dan penerapan transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan dan swasta. TI-Indonesia adalah bagian dari suatu jaringan global organisasi-organisasi anti korupsi di dunia, yang berpusat di TI Secretariat di Berlin, Jerman.

TI-Indonesia berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki kantor daerah serta mitra di lebih dari 10 kota di Indonesia. Kegiatan TI-Indonesia berfokus pada usaha sosialisasi dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa publik, transparansi keuangan partai politik, riset-riset pengukuran korupsi, dan kampanye penyadaran masyarakat lewat media massa.



Transparency International Indonesia
 Jl. Senayan Bawah No. 17, Blok S Rawabarat
 Jakarta 12180, Indonesia
 Telepon: 62-21-7208515
 Fax: 62-21-7267815

Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia :

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap



Disclaimer: This report is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) and Millennium Challenge Corporation (MCC). The contents of this report are the sole responsibility of Transparency International Indonesia and do not necessarily reflect the view of USAID or the United States Government.

Apakah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia?

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (disingkat IPK Indonesia) adalah pengukuran tingkat korupsi dari pemerintah daerah kota. Indeks pengukuran ini merupakan hasil pengolahan data dari survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TI-Indonesia).

TI-Indonesia saat ini meluncurkan IPK Indonesia ketiga kalinya. Pada tahun 2004 dan tahun 2006, TI-Indonesia meluncurkan IPK Indonesia terhadap masing-masing 21 kabupaten/kota (2004) dan 32 kabupaten/kota (2006). Tahun 2008, TI-Indonesia melakukan survei di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibukota provinsi di seluruh Indonesia, ditambah 17 kota yang dianggap signifikan secara ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

IPK Indonesia menampilkan ukuran tingkat korupsi dalam bentuk skor, dengan rentang 0 sampai dengan 10. 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih.

Siapakah Responden Dalam Survei IPK Indonesia 2008?

Responden dalam survei ini berasal dari tiga kelompok masyarakat, yaitu pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pejabat publik. Ini membedakan survei IPK Indonesia 2008 dengan survei-survei sebelumnya, yang hanya mengambil responden dari pelaku bisnis saja. Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan metodologi, yang antara lain didapat dari masukan terhadap IPK Indonesia yang diluncurkan sebelumnya.

Siapakah yang membuat desain penelitian IPK Indonesia 2008?

Desain penelitian IPK Indonesia 2008 dibuat oleh peneliti dari TI-Indonesia, dengan dibantu oleh ahli riset pengukuran korupsi dari Transparency International Secretariat di Berlin.

Bagaimana IPK Untuk Masing-masing Kota Diformulasikan?

IPK Indonesia dihasilkan dari formulasi jawaban responden dari kalangan pelaku bisnis, mengenai persepsi mereka tentang tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di kota masing-masing, dan persepsi tentang usaha pejabat publik dalam memberantas korupsi.

Responden pelaku bisnis diminta memberi skor terhadap persepsi mereka sendiri, dengan rentang skor 0 sampai dengan 10. Kemudian untuk setiap kota, jawaban dari pelaku bisnis dari dua aspek diatas diambil rata-rata untuk menghasilkan IPK kota tersebut.

Daftar 50 Kota yang Disurvei dan IPK Indonesia 2008

No.	Kota (n = jumlah responden pelaku bisnis)	IPK
1	Jogjakarta (n = 44)	6.43
2	Palangkaraya (n = 31)	6.1
3	Banda Aceh (n = 30)	5.87
4	Jambi (n = 42)	5.57
5	Mataram (n = 42)	5.41
6	Surakarta (n = 53)	5.35
7	Tasikmalaya (n = 55)	5.12
8	Banjarmasin (n = 51)	5.11
9	Samarinda (n = 35)	5.03
10	Pangkal Pinang (n = 31)	5.03
11	Ternate (n = 27)	5.01
12	Jayapura (n = 32)	5.01
13	Malang (n = 55)	5
14	Jember (n = 42)	4.96
15	Kediri (n = 42)	4.9
16	Balikpapan (n = 35)	4.86
17	Gorontalo (n = 30)	4.83
18	Makassar (n = 73)	4.7
19	Padang (n = 54)	4.64
20	Sampit (n = 39)	4.6
21	Semarang (n = 72)	4.58
22	Bandar Lampung (n = 54)	4.58
23	Cilegon (n = 42)	4.57
24	Palu (n = 42)	4.5
25	Bengkulu (n = 42)	4.46
26	Batam (n = 52)	4.44
27	Sorong (n = 30)	4.39
28	Tenggarong (n = 31)	4.38
29	Tanjung Pinang (n = 31)	4.35
30	Ambon (n = 31)	4.32
31	Surabaya (n = 84)	4.26
32	Denpasar (n = 43)	4.25
33	Sibolga (n = 30)	4.25
34	Lhoksemauwe (n = 30)	4.14
35	Mamuju (n = 29)	4.08
36	Jakarta (n = 219)	4.06
37	Manado (n = 40)	3.98
38	Pematang Siantar (n = 29)	3.96
39	Palembang (n = 73)	3.87
40	Medan (n = 83)	3.84
41	Cirebon (n = 43)	3.82
42	Pontianak (n = 53)	3.81
43	Bandung (n = 84)	3.67
44	Padang Sidempuan (n = 30)	3.66
45	Pekanbaru (n = 52)	3.55
46	Purwokerto (n = 30)	3.54
47	Kendari (n = 42)	3.43
48	Manokwari (n = 33)	3.39
49	Tegal (n = 30)	3.32
50	Kupang (n = 44)	2.97

Apakah Indeks Suap?

Indeks suap adalah pengukuran tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik di Indonesia. Indeks suap mengukur tingkat kecenderungan terjadinya suap secara nasional. Indeks suap ditampilkan dalam bentuk persentase (0-100%), yaitu rata-rata jumlah total interaksi suap yang terjadi, dibanding total keseluruhan interaksi responden dari pelaku bisnis dengan institusi tersebut. Indeks suap juga menampilkan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan untuk suap per transaksi.



Bagaimana Indeks Suap Diformulasikan?

Indeks suap dihasilkan dari jawaban responden pelaku bisnis berkaitan dengan pengalaman mereka dimintai uang suap saat berhubungan dengan institusi publik dalam konteks pelayanan ataupun bisnis. Rasio dari total jumlah hubungan dengan institusi publik dengan jumlah dimana mereka dimintai uang suap dihitung. Rasio dari masing-masing institusi kemudian di rata-ratakan dan ditampilkan dalam bentuk persentase (Indeks Suap). Untuk setiap kontak suap yang terjadi, responden diminta memberikan keterangan tentang jumlah uang yang diminta (rata-rata). Totalnya kemudian dirata-ratakan untuk masing-masing institusi.